

## ARTIKEL

### **Implementasi Perda No 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar Di Kota Semarang (studi kasus Pasar Johar)**

Oleh :

Sundari Yuwan Angelia, Aloysius Rengga, Slamet Santoso

#### **Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro**

Jl. Profesor Haji Sudarto, Sarjana.Hukum Tembalang Semarang Kotak Pos 1269

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman : <http://www.fisip.undip.ac.id> email [fisip@undip.ac.id](mailto:fisip@undip.ac.id)

Email: [syuanangelia@gmail.com](mailto:syuanangelia@gmail.com)

#### **ABSTRACT**

*The Government of Semarang city through Perda No. 2 / 2012 about Retribution Market service in Semarang City which is a case study in order to maximize the service of the Johar market. There are many problems in Johar market as the facility is the merchants and residents that is not good they paid retribution, not just in time it found the situation worse in the program, public order and security. Interestingly the fare in pay is not in accordance with Perda No. 2 / 2012 already set in . Based on, the writers interested researched about Retribution Market service in Semarang City which is a case study Johar market. This research is guided by theory belongs Riant Nugroho with 5 precision this is appropriateness of the policy, implementation, environment, targets and process to know Perda No. 2 / 2012 about Retribution Market service in Semarang City which is a case study Johar market. To find out by factors in support and inhibitors of the implementation of market levies for the writer holding on to the theory of Edward III who consists of resources factor, communication factors, disposition factors, and the bureaucratic structure factors. Researchers used a qualitative approach. The result of suggests that there are still some things should be improved in the process of policy that the awareness of traders in order to carry out retribution, there are many officers not firmly, levy charges must be consistent with the policy set, officers are still the slow and agencies involved to finish problems. While a factor that impeding policy this is not consistent in the implementation of the job, who had not realized that other agencies are responsible for this policy together, the officers miscommunication between traders and lack of awareness of traders. Giving advice to the writer is the levy to be adjusted, the provision of the facilities must be optimized, officers must firmly, additional security personnel, employees enhanced quality and quantity, and coordination with related agencies must be done in optimally.*

**Keyword:** *Perda no 2 / 2012, policy implementation, Retribution Service Market.*

## PENDAHULUAN

Penelitian Implementasi Perda no 2 tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar di Kota Semarang khususnya Pasar Johar ini dilatarbelakangi realisasi penerimaan retribusi pasar Johar yang tidak memenuhi target. Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Target retribusi tahun 2012 5.649.931.448 realisasi 4.912.983.868, target tahun 2013 6.491.178.866 realisasi 5.644.503.362, target tahun 2014 7.543.473.724 realisasi 6.559.542.369.

Untuk mengatasi permasalahan yang timbul di Pasar Johar Kota Semarang yang dilakukan pemerintah Kota Semarang mengeluarkan Perda no 2 tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar khususnya Pasar Johar. Pedagang harus patuh terhadap peraturan perda dengan membayar pungutan sesuai dengan isi perda. Konsekuensi dari karakteristik tersebut adalah bagaimana peran pemerintah untuk melakukan pembenahan bagi pedagang untuk setidaknya membantu dalam menciptakan keberhasilan pelaksanaan perda dengan membayar retribusi sesuai dengan waktu dan tarif yang sudah ditentukan dan juga implementor yang melakukan pemungutan harus disiplin dalam menjalankan tugas.

## B. TUJUAN

Tujuan penelitian dimaksudkan untuk memberikan arah yang tepat dalam proses dan pelaksanaan penelitian yang dilaksanakan agar penelitian tersebut berjalan sesuai dengan apa yang hendak dicapai. penelitian ini dimaksudkan dengan tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Implementasi Perda No.2 tahun 2012 tentang retribusi pelayanan pasar kota semarang di pasar johar.

2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat dalam penarikan retribusi berdasarkan Implementasi Perda No.2 tahun 2012 tentang retribusi pelayanan pasar kota semarang di pasar johar.

## C. Teori

Teori yang digunakan adalah:

1. Kebijakan Publik

Kebijakan Publik menurut Thomas Dye (AG. Suarsono, 2008) adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan (*public policy is whatever governments choose to do or not to do*). Sedangkan James A. Enderson (AG. Suarsono, 2008) mendefinisikan kebijakan publik sebagai kebijakan yang ditetapkan oleh badan-badan dan aparat pemerintah.

2. Implementasi Kebijakan

Riant D Nugroho (2003 :158)

menyatakan bahwa implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. George C. Edwards (Winarno, 2007: 174) menjelaskan bahwa studi implementasi kebijakan adalah krusial bagi *public administration* dan *public policy*. Implementasi kebijakan adalah salah satu tahap kebijakan publik, antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhi. Jika suatu kebijakan tidak tepat atau tidak dapat mengurangi masalah yang merupakan sasaran dari kebijakan, maka kebijakan itu mungkin mengalami kegagalan sekaipun kebijakan itu diimplementasikan dengan sangat baik. Sementara itu, suatu kebijakan yang telah direncanakan dengan sangat baik, mungkin juga akan mengalami kegagalan, jika kebijakan tersebut kurang diimplementasikan dengan baik oleh para pelaksana kebijakan.

#### **D. Metode**

1. Desain Penelitian menggunakan tipe Penelitian Kualitatif.
2. Fokus dari penelitian ini adalah Implementasi Perda no 2 tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar, sehingga lokus atau tempat penelitian tersebut adalah Pasar Johar di Kota Semarang.
3. Subjek Penelitian adalah Kepala Dinas Pasar Kota Semarang, UPTD Pasar Johar, Petugas di Pasar Johar,

Pedagang/Paguyuban Pedagang di Pasar Johar.

4. Jenis data adalah Data Primer dan Data Sekunder.
5. Teknik pengumpul data adalah dengan wawancara, observasi, dokumentasi dan studi pustaka
6. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis taksonomi yaitu dengan melakukan pengamatan dan wawancara terfokus berdasarkan fokus yang sebelumnya dipilih oleh peneliti.

#### **PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN**

##### **Implementasi Peraturan Daerah No 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar**

Ada banyak faktor yang mempengaruhi implementasi suatu kebijakan, namun dalam penelitian implementasi perda no 2 tahun 2012 tentang retribusi pelayanan pasar khususnya Pasar Johar ketepatan kebijakan, ketepatan pelaksanaan, ketepatan proses, ketepatan lingkungan dan ketepatan target.

Ketepatan kebijakan Pungutan retribusi dirasa sudah sesuai dengan kebijakan yang sudah dibuat. Realisasinya retribusi yang ditarik tidak sesuai dengan ketetapan kebijakan pada perda yang diatur. Ibu warni menyewa kios 3m dengan tarif Rp 7.000,00, sedangkan ibu warni ini adalah pedagang kios sepatu eceran strategi 1 yang di dalam perda di tulis Rp 750,00 per m<sup>2</sup>/hari. Rp 750,00 x 3m= Rp 2.250,00, seharusnya ibu warni hanya

membayar Rp 2.250,00/ hari.

Ketepatan pelaksanaan Penataan di Pasar Johar masih semrawut. Hal ini juga di akui oleh Bapak Sudiro selaku Kepala Bidang UPTD Pasar Johar. Penertiban dan pengawasan juga tidak kalah penting untuk diperhatikan. Begitu halnya dengan penertiban parkir yang masih tidak tertata. Pengunjung yang akan menyeberang jalan menuju ke Pasar Johar juga merasa tidak nyaman, karena tidak ada petugas yang membantu untuk mengatur lalu lintas. Hal ini tidak boleh di remehkan, karena peneliti juga mengalami langsung pada saat menyeberang jalan para pengendara motor tidak ada yang mau mengalah dan keadaan jalan sangat semrawut sekali, seperti ada yang mau berputar arah, menyeberang jalan, maupun pengendara yang melewati jalan tersebut. Ketepatan jasa pelayanan pasar ini tidak sesuai dengan regulasi pasal 40 ayat 3

Ketepatan target retribusi Pasar Johar masih banyak ditemukan ketidak sinkronnya antara tarif retribusi yang ditarik dengan tarif retribusi yang ditetapkan pada regulasinya. Tindakan yang harus dilakukan adalah membenahi sistem kinerja pegawai yang bersangkutan dan membicarakan penetapan tarif yang benar sesuai regulasi.

Ketepatan lingkungan Dinas Pasar dengan melibatkan instansi lain yang bersangkutan dirasa masih belum bisa mengatasi permasalahan di Pasar Johar.

Ketepatan Proses meninjau pedagang yang merasa keberatan untuk membayar

retribusi. Fokusnya bukan hanya pedagang besar saja, tetapi pedagang kecil juga harus di perhitungkan. Jumlah pedagang kecil juga sangatlah banyak. Pedagang besar pun sebenarnya walaupun tidak keberatan tetapi masih banyak di temukan pedagang yang tidak tepat membayar retribusi. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada kesiapan untuk pedagang, bila pedagang merasa sanggup untuk membayar seharusnya pedagang bisa membayar dengan tepat waktu. Bila seperti itu pedagang bisa dikatakan ikut melancarkan kebijakan dari implementor. Realitanya tidak seperti yang diharapkan, petugas mengeluhkan pedagang yang selalu mengulur-ulur untuk melunasi pungutan retribusi. Peneliti juga mendapatkan informasi bahkan bulan januari tahun 2015 saja masih ada yang belum melunasinya.

### **Faktor-Faktor yang Mendukung dan Menghambat Implementasi Kebijakan Retribusi Pelayanan Pasar**

Dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan pasar, ada beberapa hal yang menjadi kendala maupun hambatan hambatan dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan pasa di Pasar Johar. Hambatan maupun kendala tersebut dapat menjadi penyebab ketidاكلancaran pelaksanaan pungutan retribusi. Berikut kendala apa saja yang menjadi penyebab ketidاكلancaran pelaksanaan pemungutan retribusi berdasarkan teori Edward III.

Faktor yang mendukung: Implementor dan pedagang sudah tau mengenai retribusi

pelayanan pasar, Adanya rakor dan pertemuan berkala, Adanya keterlibatan instansi lain. Faktor yang menghambat: Pedagang selalu tidak tepat waktu membayar Retribusi pelayanan pasar, Sikap petugas harus lebih tegas dalam menjalankan tupoksinya, Fasilitas masih belum memadai.

## PENUTUP

### A. KESIMPULAN

Bab ini merupakan penutup dalam kajian penelitian. Dalam bab ini akan dipaparkan mengenai kesimpulan hasil penelitian Implementasi Perda no2 tahun 2012 tentang retribusi pelayanan pasar di kota Semarang ini menjelaskan penggolongan setiap penarikan retribusi. Penggolongan ini yang akan menentukan tarif biaya retribusi. Tujuan adanya Retribusi Pelayanan Pasar ini guna untuk menunjang beberapa aspek sesuai dengan Peraturan Daerah yang ditetapkan. Misal untuk penyediaan lahan beserta fasilitasnya, untuk menjaga kebersihan, dan lain-lain. Besar retribusi sesuai dengan golongan pedagang, maka pedagang wajib membayar retribusi tersebut.

Retribusi pasar tidak bisa dipandang sebelah mata, karena retribusi pasar sangat berperan sekali dalam otonomi daerah. Hasil pungutan retribusi pasar ini bisa untuk meningkatkan pembangunan daerah. Pemerintah memiliki tugas yang sangat penting agar masyarakat bisa menikmati fasilitas yang ada dengan nyaman. Pertumbuhan penduduk di kota Semarang ini yang sangat pesat, sehingga pemerintah harus

bisa mengatasi guna untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Fasilitas yang nyaman akan mempermudah masyarakat akan memenuhi kebutuhan masyarakat. Lancarnya penarikan atau pemungutan retribusi juga akan mempermudah meningkatkan pendapatan pedagang. Retribusi ini bertujuan juga untuk memperbaiki system keamanan, kebersihan dan kenyamanan bagi pedagang dan masyarakat.

### **Implementasi kebijakan retribusi pelayanan pasar kota Semarang apabila dilihat dari :**

#### a) Ketepatan Kebijakan

Kebijakan retribusi pelayanan pasar didasarkan atas pelayanan dan penggunaan fasilitas kepada umum yang terdapat dilingkungan pasar. Dimana prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi didasarkan atas penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas, pengendalian atas pelayanan tersebut. Struktur retribusi itu berdasarkan golongan jenis dagangan, letak tempat, jenis tempat, jenis pedagang, dan luas tempat sudah sesuai. Tetapi ketepatan tarif pungutan pedagang tidak sesuai dengan regulasi.

#### a. Ketepatan Pelaksanaan

Berdasarkan teori menurut Riant Nugroho pada halaman 52,

peneliti berkesimpulan bahwa ketepatan tarif pungutan bagi pedagang tidak sesuai dengan regulasi yang sudah tercantum dalam Perda no 2 tahun 2012. Hal ini mengidentifikasi bahwa terjadi penyelewengan yang dilakukan oleh aparat pelaksana kebijakan yaitu juru pungut dalam pelaksanaan penarikan pungutan kepada pedagang yang tidak didasarkan pada regulasi. Belum mampu menyelesaikan permasalahan yang terjadi Pasar Johar baik dalam mengoptimalkan fasilitas seperti fasilitas bangunan, kebersihan, lahan parkir dll masih sangat semrawut. Dalam ketepatan jasa pelayanan pasar juga masih kurang baik seperti penataan pedagang yang masih semrawut, penertiban dan pengawasan yang masih belum cukup tegas.

#### 7. Ketepatan Target

Target dan sasaran sudah ada yang sesuai perda no 2 tahun 2012 pasal 45 dalam hal ketepatan letak tempat. Kesesuaian jenis tempat dan pedagang dengan retribusi yang ditarik masih belum tepat dan sesuai dengan kebijakannya. Tarif yang dibayarkan tidak sesuai dengan yang seharusnya dibayarkan.

mengapa realisasi lebih kecil dari target retribusi ialah ketidakpahaman pedagang untuk taat dalam membayar retribusi yang pada akhirnya berpengaruh terhadap pendapatan retribusi. Dan masih banyak permasalahan pedagang yang tidak tepat waktu membayar retribusi sehingga menghambat kelancaran kebijakan.

#### 8. Ketepatan Lingkungan

Keterlibatan instansi lain ini cukup membantu proses kebijakana. Permasalahan di pasar sangatlah banyak, sehingga dengan adanya instansi lain yang ikut campur tangan bisa sedikit membantu memberikan solusi untuk permasalahan. Implementor juga sudah mengetahui lembaga-lembaga yang terkait dengan kebijakan retribusi pasar dan memahami Tupoksi yang sudah diberikan sehingga pelaksanaan kebijakan retribusi pasar berjalan efektif. Walaupun banyak pedagang yang mengeluhkan hal ini, sehingga pemerintah dinilai lamban untuk mengatasi permasalahan ini.

#### 9. Ketepatan Proses

Setiap pegawai memiliki tupoksi masing-masing. Juru pungut retribusi ini juga bukan dari pihak

UPTD Pasar Johar melainkan dari pegawai di Dinas Kota Semarang. Tugas UPTD Pasar Johar adalah hanya sebagai administrasinya saja.

### **Implementasi kebijakan retribusi Pasar Johar di Kota Semarang menemui beberapa faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan kebijakan seperti**

#### 1. Faktor Sumber Daya

Kualitas/ kuantitas di Dinas maupun UPTD Pasar Johar dirasa sudahlah cukup baik. Pegawai dari Dinas maupun UPTD Pasar Johar sudah memenuhi standar dan mereka pun juga sudah melaksanakan tupoksinya dengan baik. Informasi yang di sampaikan untuk pedagang juga sudah baik,. Pegawai Dinas dan UPTD Pasar Johar dalam hal kemampuan tentang keahlian dan wewenang petugas juga sudah baik. Faktor diatas tadi bisa berjalan dengan baik karena juga di dukung dengan fasilitas yang memadai. Fasilitas pendukung yang digunakan oleh pegawai sudah cukup memenuhi kebutuhan sesuai dengan tupoksinya.

#### 2. Faktor Komunikasi

Ada beberapa faktor yang masih kurang tepat dalam

pelaksanaannya. Ketepatan transmisi masih kurang baik karena ada beberapa permasalahan yang sampai saat ini belum terselesaikan , sehingga hal ini dijadikan alasan untuk pedagang mengeluh dan susah untuk di pungut retribusi. Konsistensi petugas juga dinilai kurang baik kerana petugas tidak tegas dalam pelaksanaannya, sehingga pedagang seandainya sendiri. Dalam hal kejelasan dalam penyampaian informasi petugas sudah dinilai baik dalam pelaksanaannya.

#### 3. Faktor Disposisi (sikap)

Sikap dari petugas kurang tegas, seharusnya pedagang yang sudah diberikan toleransi tapi tidak tepat waktu lagi membayarnya sesuai dengan perjanjian seharusnya petugas memberikan sanksi tegas. Karena suasana pasar yang kondusif itu juga didukung oleh ketegasan sikap oleh petugas. Pedagang juga harus bisa mematuhi apa yang sudah menjadi aturan pasar.

#### 4. Faktor Struktur Birokrasi

Kerjasama antara instansi yang terkait itu memanglah diperlukan. Baik dari DPU, DPU, Satpol PP, Kepolisian, dan dari desa. Tetapi apa yang dirasakan pedagang tidak

sesuai dengan apa yang diinginkan, pedagang masih mengeluh akan kebersihan di pasar padahal koordinasi yang dilakukan antara Dinpas dengan dinas-dinas yang terlibat sudah baik.

### **Saran**

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara peneliti memberikan beberapa rekomendasi antara lain:

- a. Tarif retribusi pasar harus disesuaikan dengan regulasi, sehingga tidak merugikan pedagang.
- b. Seharusnya penyediaan fasilitas pasar harus di optimalkan, seperti fasilitas bangunan pasar yang perlu diperbaiki dan ditata kembali, fasilitas umum lainnya seperti kebersihan MCK, mushola dan kebersihan pasar harus terjaga kebersihannya. Memperluas lahan parkir, sehingga parkir tertatapan tidak terlihat semrawut.
- c. Petugas harus lebih tegas lagi untuk menertibkan pedagang, seperti penataan pedagang.
- d. Penambahan petugas keamanan untuk mengawasi pasar dari aksi kejahatan, dan membantu penertiban lalu lintas depan pasar supaya tidak terjadi kemacetan akibat lalu lintas yang semrawut.
- e. Kualitas dan kuantitas pegawai harus ditingkatkan, karena dengan pengetahuan pegawai yang baik akan memberikan kontribusi yang sangat

besar untuk mengoptimalkan kebijakan yang dibuat. Pegawai yang kualitasnya baik, akan bisa memberikan ide/ solusi sehingga bisa membantu menyelesaikan permasalahan di lapangan.

- f. Seharusnya pemerintah bisa segera memberikan solusi untuk menyelesaikan permasalahan di Pasar Johar. Pada saat raker seharusnya pedagang dilibatkan/diikutsertakan sehingga pedagang juga mengetahui apa yang terjadi. Penyampaian informasi juga harus di komunikasikan dengan baik dan jelas agar pedagang paham dari yang disampaikan.
- g. Petugas sangat berperan penting, sehingga petugas harus bersikap tegas dalam melaksanakan tugasnya. Petugas yang bertele-tele dan tidak tegas seharusnya digembleng, atau diberi sanksi. Seharusnya pedagang yang tidak tepat membayar retribusi harus dikenai denda, tujuannya untuk memberikan efek jera.
- h. Koordinasi yang dilakukan antara Dinpas dengan dinas-dinas yang terlibat harus sering dilakukan untuk membahas permasalahan dan memberikan solusi yang tepat, tujuannya agar permasalahan di Pasar Johar cepat terselesaikan.



## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku:**

- Effendi, Taufiq. 2008. *Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik* . Semarang : Universitas Diponegoro
- Larasati, Endang. 2007. *Pelayanan Publik Dalam Dimensi Hukum dan Administrasi Publik*. Semarang : Universitas Diponegoro
- Mufiz, Ali. 2004. *Pengantar Ilmu Administrasi Negara*. Jakarta : Buku Materi Pokok Adpu4130/3sks/MODUL 1-9
- Nogi, Hessel. 2003. *Implementasi Kebijakan George Edward*. Yogyakarta : Lukman Offset
- Nugroho, Riant. *Public Policy*. 2009. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo
- Nurmandi, Achmad. 2010. *Manajemen Pelayanan Publik*. Yogyakarta : PT Sinergi Visi Utama
- Suwitri, Sri. 2011. *Konsep dasar Kebijakan Publik*. Semarang : Universitas Diponegoro
- Syafiie, Inu Kencana. 2006. *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta : PT Rineka Cipta
- Wijayanti, D . 2008 . *Dampak Revitalisasi Pasar terhadap Interaksi Sosial dan Pendapatan Pedagang di Pasar Legi Kota Blitar* . Skripsi . Malang : Universitas Negeri Malang
- Winarno, Budi. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Wordpress.

### **Jurnal/Skripsi/Tesis/Karya Ilmiah lainnya:**

- Astuti,Widya.2011.Pengelolaan Retribusi Di Pasar Johar Semarang (periode 2007-2009).
- Chotimah, Tri Esti. (2014). Analisis Penerimaan Retribusi Pasar Terhadap Kinerja Kualitas Pelayanan Pasar Tradisional Kota Semarang: Studi Kasus Pasar Johar.
- Ferdian, Yearzy., Purbaayu, dan Hardi Warsono.2005.Implementasi Peraturan Daerah No 10 Tahun 2000 Tentang Pengaturan PasarKota Semarang Di Cabang Johar Dinas Pasar Kota Semarang.
- Identifikasi Farktor-faktor Yang Mempengaruhi Proses Implementasi Rencana Tata Ruang Kota Di Kota Semarang* . Dalam <http://eprints.undip.ac.id/4711/1/MNasir97.pdf> . Diunduh 18 Oktober 2012 pukul 22.13 WIB